



**WEBINAR**

# **TRANSPARANSI *BENEFICIAL OWNERSHIP***

Bangun Iklim Usaha yang Transparan

## **Laporan Pencapaian Aksi Stranas Pencegahan Korupsi**

Aksi Pemanfaatan Data Beneficial Ownership untuk Penanganan  
Perkara, Perizinan, dan Pengadaan Barang dan Jasa

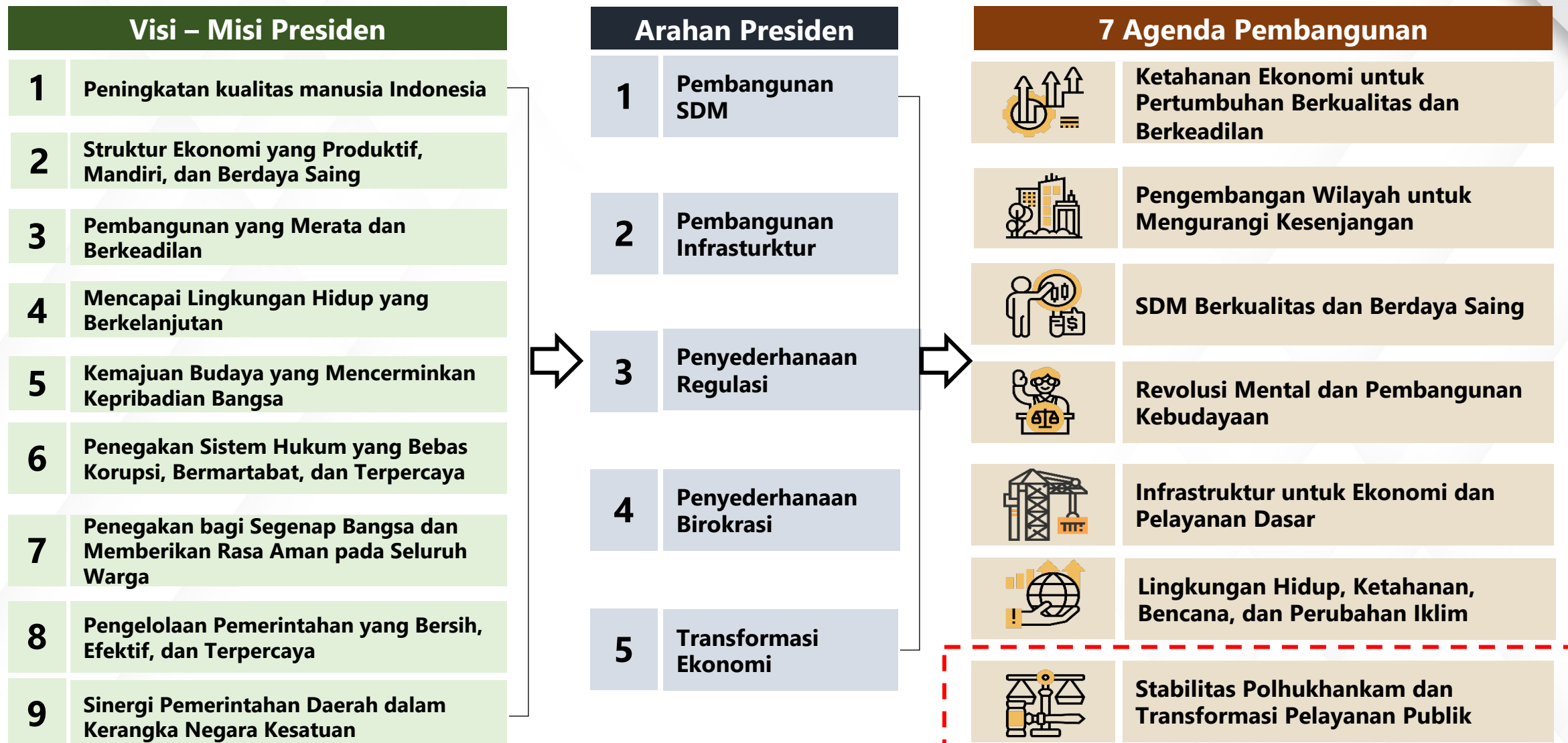
**Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan**

**Kementerian PPN/Bappenas**

**Kamis, 16 September 2021**



# AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DI DALAM RPJMN 2020-2024



# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM RPJMN 2020 – 2024

## PN 7: MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK



### PP 3 Penegakan Hukum Nasional

### PP 1 Konsolidasi Demokrasi

### PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

### PP 4 Reformasi Kelembagaan Birokrasi

### PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional



#### Penataan Regulasi

1. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi
2. Pembaruan Substansi Hukum

1



#### Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

1. Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha
2. Penerapan Keadilan Restoratif
3. Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan
4. Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim

2



#### Penguatan Sistem Anti Korupsi

1. Penguatan implementasi Stranas Pencegahan Korupsi
2. Optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset

3



#### Penguatan Akses terhadap Keadilan

1. Penguatan layanan keadilan
2. Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat

4

# Strategi Nasional Pencegahan Korupsi



Stranas PK adalah **arah kebijakan nasional** yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan KLD dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan **Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK)** di Indonesia

Indonesia meratifikasi Konvensi anti Korupsi PBB (UNCAC) melalui UU No. 7/2006

Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024



Implementasi Perpres 54/2018 Tentang Stranas PK telah memasuki **periode kedua** (2021-2022) dalam pelaksanaan Aksi PK, sejak ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2018 (Aksi PK ditetapkan setiap 2 tahun sekali)

# Tujuan, Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja

## Tujuan:

1 Memberikan arahan tentang upaya strategis pencegahan korupsi kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain.

2 Mendorong program pencegahan korupsi yang terfokus, terukur dan berdampak

3 Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah



- a. Koordinasi
- b. Sinkronisasi
- c. Evaluasi

- a. Pendampingan dan koordinasi rutin dengan K/L/D
- b. Monitoring dan evaluasi capaian output, outcome, dan dampak
- c. Komunikasi



# Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022

## Fokus 1: Perizinan dan Tata Niaga

Korupsi di sektor perizinan menghambat kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja.

3 AKSI PK

8 OUTPUT

Aksi Beneficial Ownersip

## Fokus 2: Keuangan Negara

Menjadi fokus karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara, pelayanan publik serta sasaran pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran.

4 AKSI PK

11 OUTPUT

Pelaksana:  
46 K/L  
34 Pemprov  
42 Pemkab/Kota

## Fokus 3: Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara.

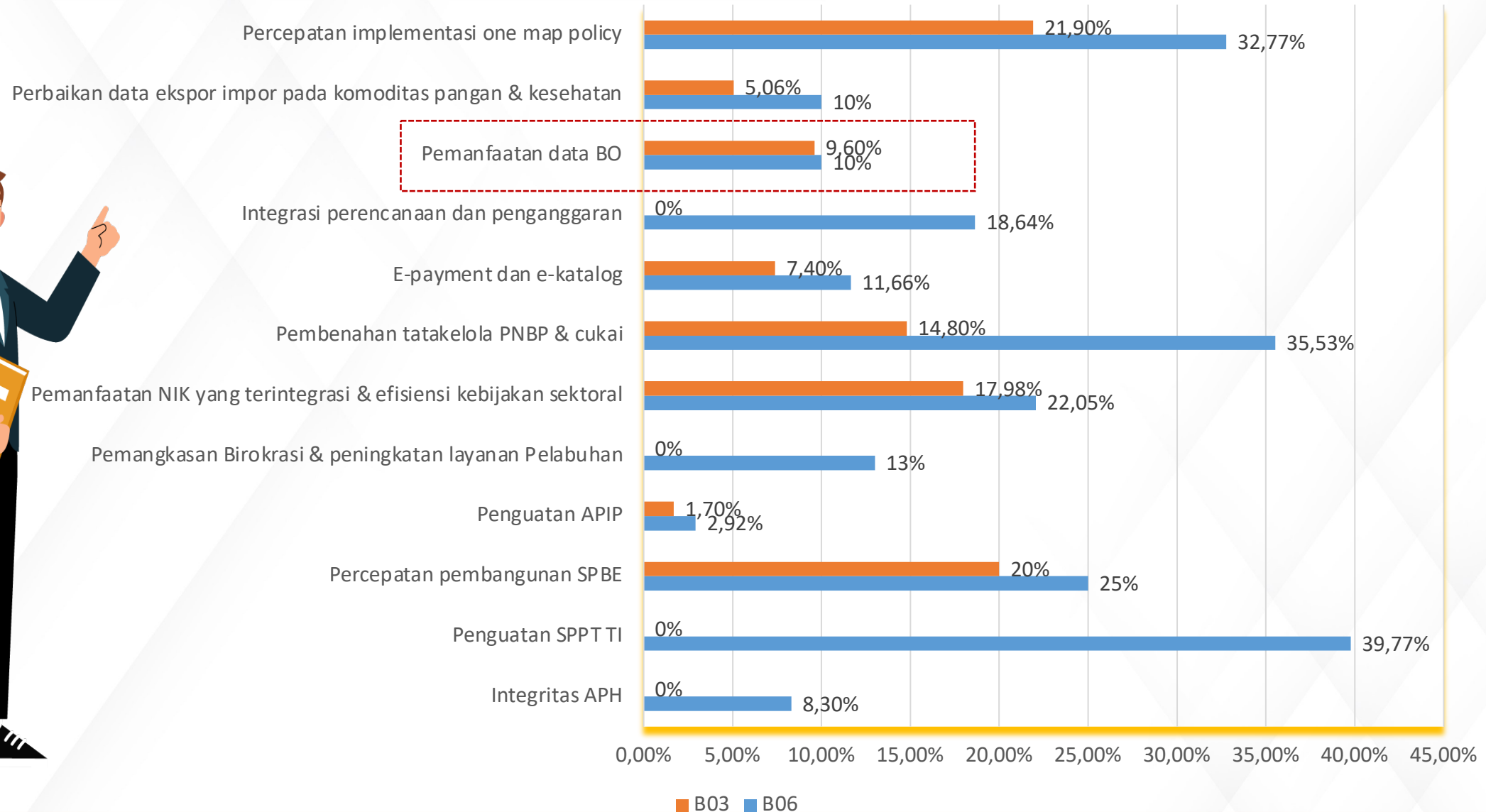
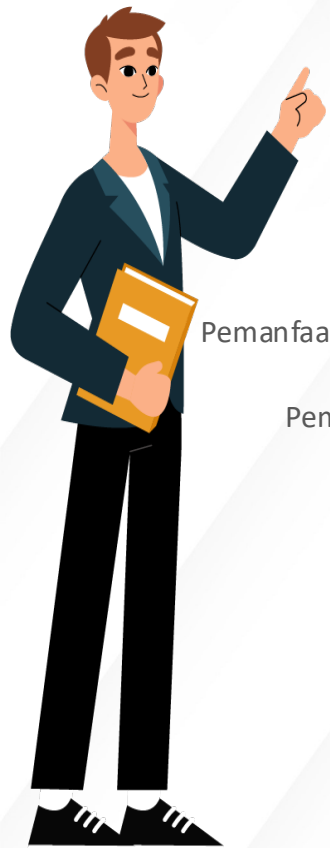
5 AKSI PK

10 OUTPUT

\*1. Aksi PK = outcome yang akan dicapai selama periode 2021-2022

2. Aksi PK tidak dilaksanakan homogen oleh KLD pelaksana, tergantung tupoksi masing-masing

# Capaian Pelaksanaan Aksi PK sampai dengan Semester I (B06)



# Capaian Pelaksanaan Aksi PK sampai dengan Semester I (B06)

TIME LINE 2021-2022 ---- 100 %

Capaian 0-9%

Integritas APH

Penguatan APIP



47 K/L  
34 Prov dan  
42 Kab/Kota

Capaian 10% -19%

INSW

**Pemanfaatan Data BO**

Integrasi Penganggaran

E-payment & e-katalog

Pelabuhan

Capaian > 20%

One Map Policy

PNBP & cukai

Pemanfaatan NIK

SPBE

SPPT TI



# Definisi *Beneficial Ownership*

Unsur definisi **Pemilik Manfaat** berdasarkan Perpres 13/2018:

1. Menunjuk atau memberhentikan pengurus korporasi
2. Mengendalikan korporasi
3. Menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung
4. Pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi

# Urgensi Transparansi Data Beneficial Ownership

## Transparansi *Beneficial Ownership* Korporasi



Mencegah **penyalahgunaan korporasi** sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan korupsi serta **memaksimalkan pemulihan aset** hasil tindak pidana\*



Meningkatkan **kredibilitas** dan menciptakan **iklim investasi** yang baik\*\*



Pemenuhan **komitmen Indonesia** di dunia internasional: *Anti Corruption Working Group G20, Financial Action Task Force (FATF), United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Open Government Partnership (OGP)*



Menciptakan **keadilan** dan meningkatkan **kualitas pengadaan** barang dan jasa Pemerintah\*\*\*

\*Financial Action Task Force (FATF) 2014 dan KPK (2016)

\*\*World Bank (2020), Transparency International (2020), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2016)

\*\*\*Data KPK (2019) perkara korupsi bidang PBJ cukup tinggi

1

Hasil estimasi data panel di negara ASEAN-5 periode 1995-2015 menunjukkan bahwa **terdapat hubungan signifikan antara korupsi dan PDB terhadap FDI**. Negara yang tidak terlalu korup dan ukuran pasar yang lebih besar akan menarik lebih banyak aliran masuk (*inflow*) FDI.

Karim et al, (2018). Corruption and Foreign Direct Investment (FDI) in ASEAN-5: A-Panel Evidence. Economics and Finance in Indonesia. Vol. 64 (2)

2

Dengan menggunakan *robust random effect*, ketika **korupsi merajalela di suatu negara, investor asing enggan berinvestasi**, sehingga, korupsi berdampak negatif pada arus masuk FDI di negara-negara SADC.

Does Corruption Affect Foreign Direct Investment Inflows in SADC Countries (2020) Journal of Applied Accounting and Taxation Moses Garai Chamisa, Midland State University. Southern African Development Community (SADC).

3

Data panel dari 46 negara Asia dan Pasifik dari tahun 2006-2013 menunjukkan bahwa korupsi menurunkan aliran masuk FDI. **Penurunan tingkat korupsi meningkatkan aliran masuk FDI terutama pada negara maju.**

Canare, T. (2017). The Effect of Corruption on Foreign Direct Investment (FDI) Inflows: Evidence from a Panel of Asia –Pasific Countries, Current Perspectives and Future Challenge.

4

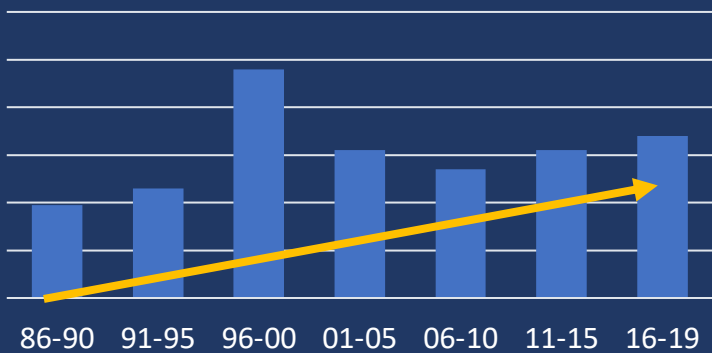
Pemerintah perlu **menghapus semua struktur birokrasi yang tidak perlu untuk mencegah terjadinya suap.**

Abotsi, A.K. (2016). Theory of Foreign Direct Investment and Corruption International Journal of Asian Social Science, Vol. 6(6): 359-378

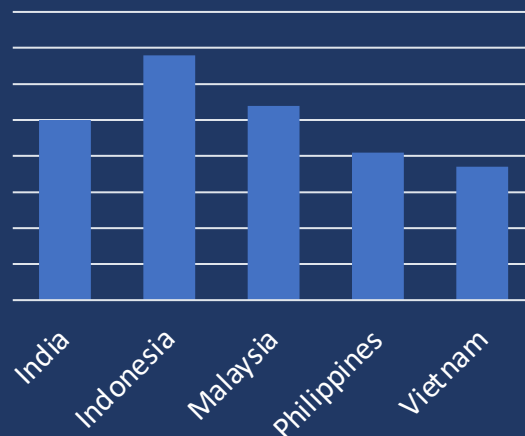
# Hambatan investasi: Korupsi Mendorong Inefisiensi Aktivitas Investasi di Indonesia

Efisiensi Investasi di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara *peers* dan semakin turun dari waktu ke waktu

ICOR Indonesia



ICOR 2015-2019



\*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

**“untuk meningkatkan setiap Rp1,0 PDB,  
dibutuhkan Rp6,0 Investasi”**

Meningkat dibandingkan zaman sebelum krisis yang hanya butuh Rp4,0 Investasi untuk meningkatkan per Rp1,0 PDB. Dibandingkan dengan negara tetangga biaya investasi Indonesia mahal

Biaya  
Investasi di  
Indonesia  
mahal

Birokrasi yang  
tidak efisien

Korupsi

Biaya Pengadaan  
Lahan Tinggi

Regulasi yang  
Tertutup dan  
tumpang tindih

Biaya Logistik yang  
Tinggi

Sumber: Deputi Bidang Ekonomi Bappenas

# Transparansi *Beneficial Ownership*



Tiga besar lembaga pemeringkat risiko (Credit Rating Agency), yakni **Standard & Poor's**, **Moody's** dan **Fitch**, menggunakan **transparansi korporasi** sebagai kriteria dalam penilaian mereka. (UNODC, 2021)

## Indonesia Sovereign Rating

Standard & Poor's		Moody's		Fitch	
2016	BB+ *	2016	Baa3*	2016	BBB-* **
2017	BBB-	2017	Baa3* **	2017	BBB
2018	BBB-*	2018	Baa2	2018	BBB*
2019	BBB	-	-	2019	BBB*
2020	BBB* ** **	2020	Baa2*	2020	BBB*
2021	BBB*	2021	Baa2*	2021	BBB*

\*rating affirmation

\*\* outlook revised from positive to stable

\*\*\* outlook revised from stable to positive

\*\*\*\* outlook revised from stable to negative

Note: Foreign Currency Long Term Debt

- Kebijakan BO diterbitkan pada **2018 melalui Perpres 13/2018**
- Seiring kebijakan tersebut, **credit rating Indonesia terus membaik**

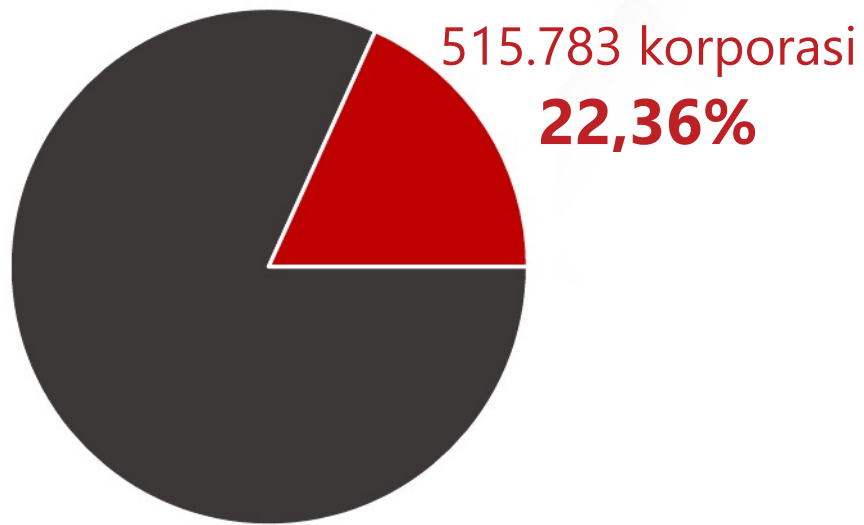


# Aksi Pemanfaatan Data *Beneficial Ownership* 2021-2022

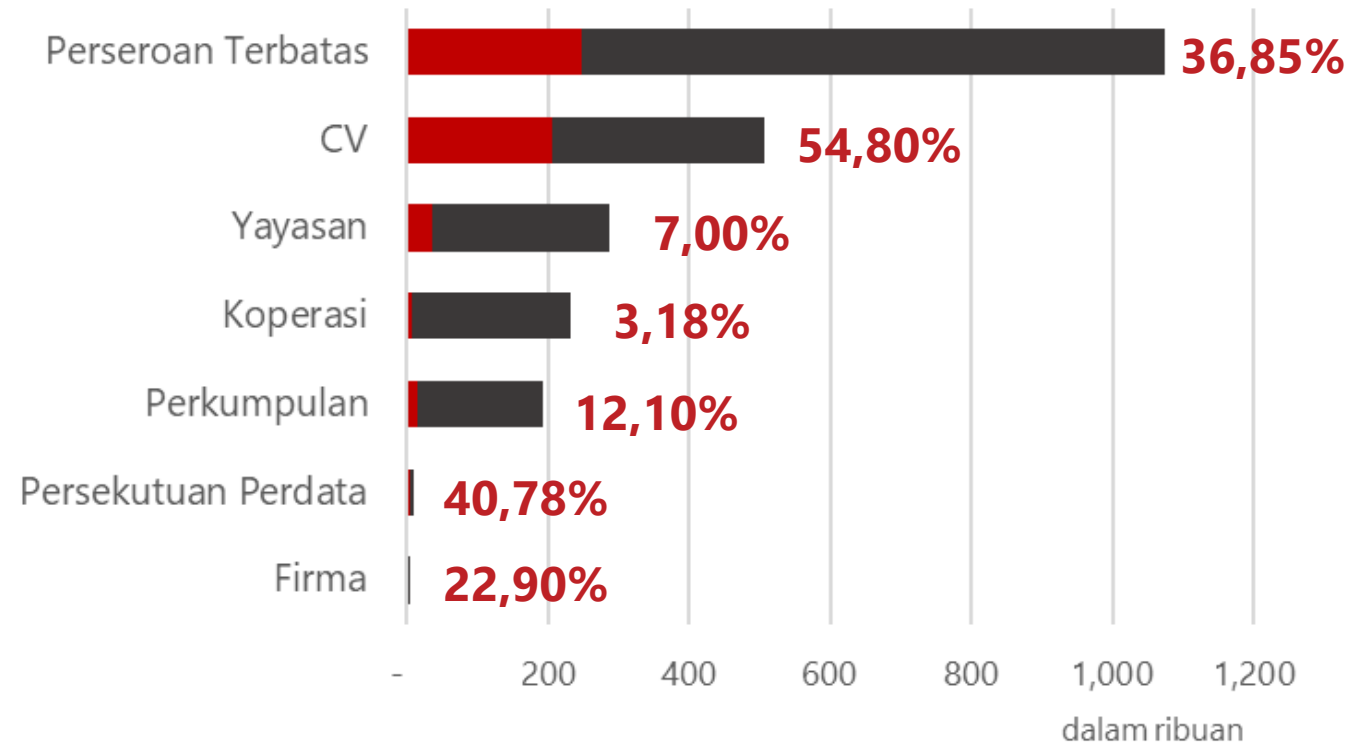
OUTCOME	OUTPUT	TARGET
Termanfaatkannya integrasi sistem basis data BO dalam penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa	1. Tersedianya <b>basis data yang berisikan <i>Beneficial Ownership</i> (BO) yang telah terintegrasi</b> dengan Kementerian/Lembaga terkait	Seluruh korporasi telah mendeklarasikan BO
	2. Terbukanya <b>akses publik</b> terhadap basis data yang berisikan <i>Beneficial Ownership</i> (BO)/Penerima Manfaat	30% peningkatan akses oleh publik per triwulan
	3. Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan <b>Aparat Penegak Hukum, Perizinan, dan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	10% peningkatan akses oleh APH per triwulan
		Seluruh pengajuan izin, telah mendeklarasikan/memanfaatkan data BO
		Seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah memanfaatkan data BO

# Pencapaian Aksi 1: Jumlah Basis Data BO

Kementerian Hukum dan HAM telah mengembangkan Sistem Basis Data *Beneficial Ownership* pada AHU Online. Jumlah Korporasi yang telah melaporkan BO per 31 Agustus 2021 tercatat sebanyak **515.783 korporasi (22,36%)** dari jumlah korporasi sebanyak **2.306.908 korporasi**.



\*) termasuk korporasi yang dormant/tidak aktif



sumber data: Ditjen AHU-Kemenkumham RI, diolah

# Pencapaian Aksi 2: Keterbukaan Data BO bagi Publik

KORPORASI-  
INSTANSI  
BERWENANG

INSTANSI  
BERWENANG –  
INSTANSI  
PEMINTA

INSTANSI BERWENANG –  
PIHAK PELAPOR

INSTANSI BERWENANG - PUBLIK

1. Stranas PK Bersama CSO *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia telah menyusun **kajian keterbukaan data *Beneficial Ownership*** bagi Publik, Pihak Pelapor, Instansi Peminta, dan Instansi Berwenang.
2. Keterbukaan data BO bagi publik, instansi peminta dan pihak pelapor dapat dilakukan dengan **perbedaan tingkat kedalaman informasi**.

# Pencapaian Aksi 3: Visualisasi Jejaring Data BO

Untuk meningkatkan pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO), Stranas PK bekerjasama dengan CSO Auriga mengembangkan **fitur visualisasi jejaring data BO** untuk melihat keterhubungan korporasi dan BO-nya.





# Pencapaian Aksi (4)

## 1. Pengumpulan Data BO Secara Online Saat Perizinan



### Kementerian ESDM

Korporasi yang Sudah Menyampaikan BO:

**Total BO bidang usaha Migas, Minerba, Ketenagalistrikan dan EBTKE**

**1.640**

\*EBTKE: Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi  
\*\*Belum terdapat laporan jumlah korporasi yang belum menyampaikan BO

Data BO di bidang ESDM sudah dihimpun **secara online saat perizinan** melalui <https://bo.esdm.go.id>.



### Kementerian Pertanian

Laporan Pemilik Manfaat



Data BO sudah dihimpun **secara online saat perizinan** melalui SIPERIBUN <https://sip.ditjenbun.pertanian.go.id>

Data BO di Kementerian/Lembaga lainnya diharapkan dapat dikumpulkan saat perizinan, secara elektronik, dan terintegrasi dengan Kemenkumham

## 2. Pemanfaatan Data BO Bidang Perpajakan



### Kementerian Keuangan Ditjen Pajak

Jumlah Inquiry Data BO oleh DJP*		Ketersediaan Data BO*	
Pengawasan	: 6	Ada BO	: 64
Penagihan	: 16	Tidak ada BO	: 45
Pemeriksaan	: 17	Tidak Ditemukan	: 7
Pemeriksaan Bukti Permulaan	: 77	<b>Total</b>	<b>: 116</b>
Penyidikan	: 0		
<b>Total</b>	<b>: 116</b>		

Sumber: Ditjen Pajak,  
\*Pemanfaatan Data BO oleh Ditjen Pajak selama 2021 (sept)

Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak mengintruksikan **pemanfaatan data BO** dari Kemenkumham oleh Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia



# Tindak Lanjut Penguatan Aksi *Beneficial Ownership*



Penguatan regulasi melalui penyusunan RUU Badan Usaha, RUU Perampasan Aset, dan Revisi UU Jabatan Notaris



Strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman pentingnya transparansi BO dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif



Dukungan sistem informasi *Beneficial Ownership* yang terintegrasi



Dukungan Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, lembaga profesi seperti notaris, dan masyarakat



**STRANAS PK**

**SEKRETARIAT NASIONAL  
PENCEGAHAN KORUPSI  
(SETNAS PK)**



Gedung Merah Putih KPK  
Jl. Kuningan Persada No.4,  
Setiabudi, Jakarta - Indonesia



021-25578300 ext. 8014



<https://stranaspk.kpk.go.id>



@stranaspk\_official



StranasPK Official



Kementerian  
Dalam Negeri



panrb  
INSTITUSI  
NUSANTARA  
BERSAMA SAMA MELAKUKAN  
REFORMASI



Kementerian PPN/  
Bappenas



KANTOR STAF PRESIDEN